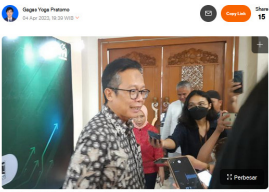


	News Title : Sejauh Mana Proses Pembentukan Bursa Kripto Indonesia?	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Gagas Yoga Pratomo
	Publish Date : 04 April 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman RI,), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Crypto	Topic : Bursa Kripto

Sejauh Mana Proses Pembentukan Bursa Kripto Indonesia?



Yeka Hendra Fatika, Didid Noordiatmoko dan pengikutnya. Liputan 6.com. Foto: Gagas Yoga

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan target peluncuran Bursa Aset Kripto Indonesia pada Juni 2023. Sejauh mana proses pendirian bursa aset kripto hingga saat ini?

Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengungkapkan sejauh ini proses pendirian **bursa kripto** masih sangat awal.

BACA JUGA:
ATM Kripto Menawar 15,81 Persen Sejak Desember 2022, Kenapa?

"Proses bursa aset kripto masih on track, tetapi kan dalam pendiriannya kita juga perlu memperhatikan UU PPSK jadi tidak bisa asal dalam prosesnya," kata Didid kepada wartawan pada saat pertemuan Badan Literasi Fintech, Selasa (4/4/2023).

Selengkapnya, Didid mengungkapkan **bursa kripto Indonesia** bakal meluncur pada Juni 2023. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Perdagangan agar Bappebti segera membentuk bursa kripto.

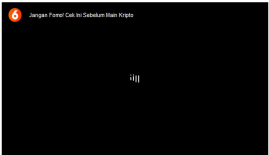
"Jadi Bappebti adanya bursa kripto itu sebagai kebutuhan. Dengan adanya bursa kripto, kita akan berbagi risiko antara Bappebti dan bursa kripto itu sendiri," kata Didid dalam rapat kerja Bappebti, Januari 2023.

Pada kesempatan yang sama, Didid juga memberikan informasi terbaru terkait kasus maladministrasi dalam proses permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

"Kita akan mengikuti saran-saran yang diberikan oleh Ombudsman, tetapi kita Bappebti juga harus patuh pada aturan perundang-undangan," jelas Didid.

Ombudsman RI menyatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terbukti melakukan maladministrasi dalam proses permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, berdasarkan rangkaiannya pemeriksaan dokumen dan pihak terkait, ditemukan tiga bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh **Bappebti** dalam proses perizinan bursa berjangka. Melalui penuntutan berikut, penyimpangan prosedur dan penyimpangan wewenang.



2 dari 3 halaman

Izin Usaha Bursa Kripto Ada Maladministrasi, Wamendag Turun Tangan



Walid Menter Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam sebuah momen dalam rapat.

Walid Menter Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan bahwa soal pertemuan Ombudsman RI soal 3 maladministrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap perizinan izin usaha bursa kripto.

Bappebti dituntut melakukan tiga maladministrasi kepada PT Digital Future Exchange (DFX) berupa penuntutan berikut, penyimpangan prosedur, dan penyimpangan wewenang.

Jerry mengatakan, Kementerian Perdagangan (**Kemendag**) maupun Bappebti pastinya sudah mengikuti aturan yang ada. Terkait temuan Ombudsman, pihaknya bakal mengajal hal tersebut.

"Secara umum, saya pikir kita mengacu pada peraturan. Ditah mana peraturan peraturan yang mungkin menurut Ombudsman kurang sesuai. Kita hai, kita lihat kalau memang itu ternyata ada yang misal, kita akan bersama-sama memastikan itu sesuai," tuturnya dalam acara Welcome Reception Menteri ASEAN di Eren Longti by Platani di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/3/2023).

Kendati begitu, Jerry menggarisbawahi kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi kepada Kemendag ke pun menekankan, perlindungan konsumen tetap jadi hal utama yang diutamakan pemerintah.

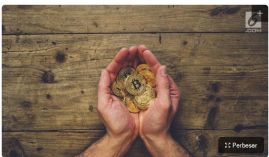
"Tentu saja kita haruslah kepada semua pihak. Saya pikir tidak hanya Ombudsman, tapi semua pihak, baik aksesori, teman-teman pengasas, termasuk juga pelaku. Sudah, kita juga terbuka. Yang penting, kita kalau dari Bappebti, pemerintah mengacu kepada pemerintah," ungkapnya.

"Kita yakin, apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk paling penting adalah perlindungan untuk konsumen," ujar Jerry.

BACA JUGA:
Biru Kiblat dari Pasar Kripto AS Akibat Ketidakefektifan Peraturan

3 dari 3 halaman

Temuan Ombudsman



Sebelumnya, Ombudsman telah menemukan 3 maladministrasi yang dilakukan Bappebti terhadap PT Digital Future Exchange yaitu penundaan berikut, penyimpangan prosedur, dan penyimpangan wewenang. Maladministrasi itu berdasarkan dari 4 penemuan yang ditemukan Ombudsman.

Pertama, Ombudsman RI berpendapat bahwa PT DFX telah mengikuti seluruh rangkaian proses penuntutan pemeriksaan dan telah memenuhi semua persyaratan dokumen sebagaimana ketentuan perundang-undangan perizinan izin usaha bursa berjangka.

Ketiga, Ombudsman RI melihat adanya penundaan berikut dalam pemberian proses perizinan.